

## ABSTRAK

Pemenuhan Hak Reproduksi di Indonesia dipengaruhi dengan erat oleh budaya Patriarki, sehingga pembentukan hukum yang mengaturnya hanya didasarkan pada *viewpoint* laki-laki tanpa memperhitungkan perspektif perempuan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan masih belum sepenuhnya mengakomodir Tindakan Afirmasi bagi warga binaan perempuan dalam fungsi reproduksinya. Hak reproduksi menyusui bagi warga binaan perempuan belum secara optimal dipenuhi dan tidak memiliki mekanisme khusus dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Permasalahan yang dapat ditemui adalah (1) bagaimana politik hukum tentang afirmasi dalam pemenuhan hak reproduksi menyusui bagi warga binaan perempuan; (2) bagaimana implementasi tindakan Afirmasi bagi warga binaan perempuan di Lapas Kelas IIA Semarang (3) bagaimana kendala dan upaya terkait pemenuhan hak reproduksi menyusui warga binaan di Lapas Kelas IIA Semarang. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa (1) terdapat kekosongan hukum mengenai mekanisme dan standar penerapan tindakan afirmasi hak reproduksi bagi warga binaan perempuan; (2) Pemenuhan hak reproduksi menyusui di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang hanya dilakukan berdasarkan hukum positif, sehingga tidak ada tindakan afirmasi yang diterapkan bagi warga binaan perempuan; (3) Pemenuhan hak reproduksi menyusui menemui beberapa kendala dalam sektor regulasi hukum, anggaran, sarana prasarana, dan SDM. Upaya yang dapat dilakukan itu diperlukan pembentukan hukum yang feminis dengan menerapkan *Feminist Legal Theory* sebagai landasannya agar sistem pemasarakatan dapat lebih memperhatikan kerentanan perempuan terutama dalam fungsi reproduksinya. Upaya yang dapat dilakukan adalah percepatan pembentukan hukum, peningkatan layanan, dan penerapan tindakan afirmasi bagi warga binaan perempuan dalam fungsi reproduksinya.

**Kata Kunci:** Tindakan Afirmasi, Hak Reproduksi Menyusui, Warga Binaan Perempuan, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, *Feminist Legal Theory*.

## **ABSTRACT**

*The fulfillment of Reproductive Rights in Indonesia influenced by Patriarchal culture, so the formation of laws is only based on male viewpoints without considering women's perspectives. Law Number 22 Year 2022 on Corrections does not fully accommodate Affirmative Action for female prisoners in their reproductive function. The reproductive right to breastfeeding for female prisoners has not been fulfilled and does not have a special mechanism in its application. The research uses a juridical sociological method. The problems are (1) how the legal politics of affirmative action in the fulfillment of breastfeeding reproductive rights for female prisoners; (2) how the implementation of affirmative action for female prisoners in Class IIA Semarang Correctional Facility (3) how the obstacles and efforts related to fulfilling of breastfeeding reproductive rights of prisoners in Class IIA Semarang Women's Correctional Institution. This study found that (1) there is a legal vacuum regarding the mechanism and standards for the implementation of affirmative action on reproductive rights for female prisoners; (2) The fulfillment of breastfeeding reproductive rights in Class IIA Semarang Women's Correctional Institution only carried out based on positive law, so there is no affirmative action applied to female prisoners; (3) The fulfillment of breastfeeding reproductive rights encounters several obstacles in the sectors of legal regulation, budget, infrastructure, and human resources. Efforts to solve them are formations of feminist law by applying Feminist Legal Theory as the basis so that the correctional system can pay more attention to the vulnerability of women, especially in their reproductive function.*

**Keywords:** *Affirmative Action, Breastfeeding Reproductive Rights, Female Prisoners, Women's Correctional Institution Class IIA Semarang, Feminist Legal Theory.*